

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Davis, G. B. (1999). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*. Jakarta: Binaman Pressindo.
- Dewata, D. M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dhoho A. Sastro et al. (2010). *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Dr. S.F. Marbun, S. M. (2013). *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: UII Press.
- DY, W. (2011). *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fajar, M., & Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Graha Anugerah.
- Kusuma, H. H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerj atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, S. A. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.
- Rachmadi, U. (2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2014). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sugeng, B., & Suyadi. (2011). *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Astapa, I. G. A. (2015). "Keterbukaan Informasi Mencegah Budaya KKN". *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*. Vol. 1. No 10.
- Febriananingsih, N. (2012). "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1. No. 1.
- Informatika, B. P. (2012). "UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Turunannya". *Jurnal Modul Pelatihan Budaya Dokumentasi*. Vol. 1, No. 3.
- Kamaliah, K. (2015). "Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda". *E-Journal Ilmu Pemerintahan UNMUL*. Vol 1. No. 1
- Lestari, R. (2013). "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. Vol. 2. No. 3.
- Lolita, A., & Abudan, M. (2018). "Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 1. No. 1.
- Putmana, I. H. (2014). "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 1. No. 2.
- Somantri, Dikdik. (2019). "Karakteristik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)". *Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan*. Vol. 6. No. 2.
- Rifai, A. (2008). "Kemerdekaan Informasi: Catatan Atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik". *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*. Vol. 2. No. 9.
- Syam, F. (2015). "Hak atas Informasi dan Legal Standing Para Pihak dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 8

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Undang – Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang – Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang – Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

AKSES INTERNET

Jogja, K. I. (2018, November 13). *Visi dan Misi* . Retrieved from Portal KIP: http://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/profile/visi_misi, diakses pada Hari Selasa 13 November 2018 pukul 21.00 WIB.

WRC, M. W. (2018, Maret 6). *Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Untuk Jogja Berbudaya*. Retrieved from Mitra Wacana: <https://mitrawacana.or.id/publikasi/rilis/mengawal-keterbukaan-informasi-publik-untuk-jogja-berbudaya/>, diakses pada Hari Kamis 8 November 2018 pukul 20.00 WIB.